

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016

Nugrahini Susantinah Wisnujati
wisnujati_nugrahini@uwks.ac.id
 Dosen pada Program Studi Agribisnis
 Fakultas Pertanian
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2016 dan mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Metode analisis yang digunakan ini adalah perspektif analisis kemiskinan multidimensi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.

Hasil Penelitian ini yaitu persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 0,6 persen; tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 17,08 % menjadi 17,14 % di tahun 2016 (± 198.350 ribu jiwa); capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional; perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;

Kata kunci : Kemiskinan, Posisi Relatif, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

(TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kota/ Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Laporan tersebut dapat digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Maksud dan Tujuan.

Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Tuban tahun 2016 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Tuban yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan LP2KD tahun 2016 di Kabupaten Tuban adalah:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2016;
2. Mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH DARI SUDUT PERTUMBUHAN EKONOMI

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:

- Kawasan perbatasan antar Kabupaten/ kota berupa segitiga emas Lamongan – Bojonegoro;
- Kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (RATUBANGNEGORO) di Kecamatan Jatirogo;
- Kawasan pelabuhan meliputi: Kecamatan Bancar, Kecamatan Jenu dan Kecamatan Palang;
- Kawasan industri meliputi: Kecamatan Kerek, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu, dan Kecamatan merakurak;
- Kawasan Perdagangan di Kecamatan tuban;
- Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Bancar dan Kecamatan palang, kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

Tabel 1,
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah
Kabupaten Tuban

Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah (km ²)
	Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Kenduruan	9	-	44	189	85,73
020 Bangilan	14	-	110	308	77,27
030 Senori	12	-	69	250	78,39
040 Singgahan	12	-	59	190	79,05
050 Montong	13	-	70	256	147,98
060Parengan	18	-	67	277	114,45
070Soko	23	-	113	602	96,88
080Rengel	16	-	75	378	58,52
090Grabagan	11	-	46	229	73,79
100Plumpang	18	-	116	501	86,52
110Widang	16	-	69	368	107,14
120Palang	18	1	114	458	72,70
130Semanding	15	2	177	578	120,99
140Tuban	3	14	104	354	21,29
150Jenu	17	-	71	228	81,61
160Merakurak	19	-	100	381	103,77
170Kerek	17	-	77	348	136,55
180Tambakboyo	18	-	64	216	72,97
190Jatirogo	18	-	123	340	111,98
200Bancar	24	-	84	289	112,36
Jumlah	311	17	1.752	6.740	1.839,94

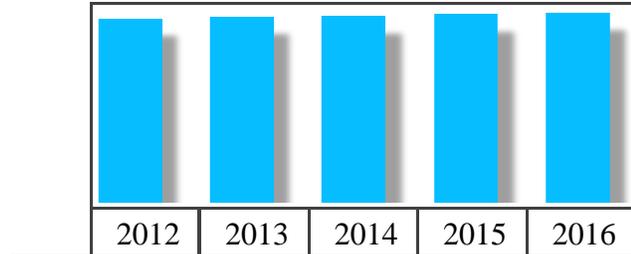
Sumber: *Tuban Dalam Angka-Data diolah*

Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Montong dengan luas wilayah 147,98 km² dan kecamatan paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan tuban dengan luas wilayah 21,29 Km². Berdasarkan registrasi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2016 berjumlah 1.315.155 jiwa yang terdiri atas 658.933 jiwa penduduk laki-laki dan 656.222 jiwa penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan hasil perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2015 yang tercatat berjumlah 1.304.080 jiwa.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Gambar 2,
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban,
Tahun 2012-2016

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sebesar ± 715 jiwa/km², angka ini meningkat jika di bandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2015 yang sebesar ± 709 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Tuban untuk tahun



2015 terdapat di wilayah Kecamatan Tuban dengan kepadatan penduduk sebanyak ± 4.419 jiwa/Km² dan pada tahun 2016 angka kepadatannya naik menjadi ± 4.452 jiwa/Km², sedangkan Kecamatan Kenduruan merupakan wilayah dengan kepadatan terendah yaitu sebesar ± 361 jiwa/Km² pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 kepadatannya naik menjadi sebesar ± 364 jiwa/Km², seperti yang tampak pada tabel 2 berikut:

Tabel 2,
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kab. Tuban,
Tahun 2015 dan 2016

Kecamatan	Luas (km ²)	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Kenduruan	85,73	30,957	361	31,206	364
020 Bangilan	77,27	54,125	700	54,374	704
030 Senori	78,39	46,982	599	47,135	601
040 Singgahan	79,05	45,642	577	45,975	582
050 Montong	147,98	58,581	396	59,185	400
060 Parengan	114,45	61,270	535	61,498	537
070 Soko	96,88	91,421	944	92,426	954
080 Rengel	58,52	64,651	1.105	64,930	1.110
090 Grabagan	73,79	42,078	570	42,540	577
100 Plumpang	86,52	87,143	1.007	87,345	1.010
110 Widang	107,14	56,749	530	56,783	530
120 Palang	72,70	93,628	1.288	94,712	1.303
130 Semanding	120,99	119,295	986	120,957	1.000
140 Tuban	21,29	94,091	4.419	94,791	4.452
150 Jenu	81,61	57,482	704	58,267	714
160 Merakurak	103,77	61,399	592	62,352	601
170 Kerek	136,55	72,135	528	72,986	535
180 Tambakboyo	72,97	77,688	612	45,087	618
190 Jatirogo	111,98	60,848	543	61,193	546
200 Bancar	112,36	60,915	542	61,413	547
Jumlah	1.839,94	1,304,080	709	1,315,155	715

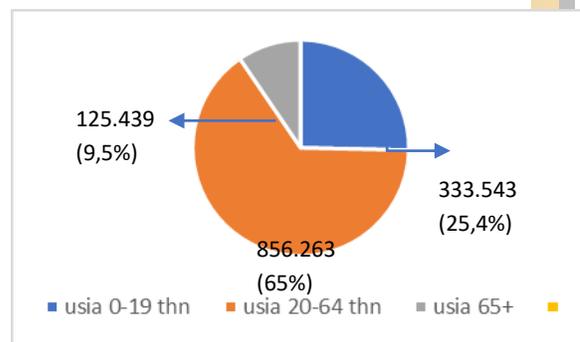
Sumber: Tuban dalam Angka 2016-2017 – data diolah

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

Pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Tuban yang berjumlah 1.315.155 jiwa terdiri dari 658.933 jiwa laki-laki dan 656.222 jiwa perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 100,41 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 100,41 penduduk laki-laki.

Berdasarkan komposisi usia, penduduk Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2016 lebih banyak berusia produktif yaitu berada antara usia 15–60 tahun sebanyak 856.263 jiwa atau sebesar 65 persen. Sementara untuk kelompok usia tidak produktif (usia <15 tahun) 333.543 jiwa atau 25,4% dan usia di atas 60 tahun sebanyak 125.439 jiwa atau 9,5% persen. Jumlah penduduk miskin menurut kecamatan berdasarkan data BDT-2015 dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut kecamatan pada tahun yang sama adalah sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3,
Persentase Penduduk Kabupaten Tuban ,
berdasar sebaran kelompok Usia Produktif



Sumber: Publikasi BPS – data diolah

Tabel 3,
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk
menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2015	Jumlah Individu dengan Kondisi Kesejahteraan s/d 40% Terendah	
		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Kenduruan	30,957	0	0
020 Bngilan	54,125	1	0,002
030 Senori	46,982	0	0
040 Singgahan	45,642	40	0,08
050 Montong	58,581	2	0,003
060 Parengan	61,270	0	0
070 Soko	91,421	0	0
080 Rengel	64,651	13	0,02
090 Grabagan	42,078	2	0,005
100 Plumpang	87,143	0	0
110 Widang	56,749	87	1,5
120 Palang	93,628	0	0
130 Semanding	119,295	37	0,03
140 Tuban	94,091	7	0,007
150 Jenu	57,482	0	0
160 Merakurak	61,399	0	0
170 Kerek	72,135	76	1,05
180 Tambakboyo	77,688	2	0,003
190 Jatirogo	60,848	0	0
200 Bancar	60,915	0	0
Jumlah	1,304,080	267	2,7

Sumber: Publikasi BPS dan BDT-2015 Kabupaten Tuban – data diolah

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan melihat potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain dapat diukur dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan perkapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, perluasan lapangan dan kesempatan kerja, serta perkembangan laju inflasi.

POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH.

Investasi daerah dapat ditingkatkan jika daerah memiliki potensi, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Hal lain yang juga sangat penting adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya dan menciptakan iklim yang kondusif dan mendukung investasi. Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mempunyai beberapa potensi unggulan diantaranya adalah:

a. Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Tuban, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Tuban memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan sebagai salah satu penghasil terbesar padi di Jawa Timur. Kabupaten Tuban terus berupaya dan berinovasi untuk menjadi produsen pertanian terbesar dengan komoditas utama padi, jagung, kedelai dan lainnya sesuai dengan cita-cita Kabupaten Tuban sebagai lumbung pangan negeri. Kabupaten Tuban memiliki luas lahan sawah seluas 98.194 Ha dengan produksi sebesar 632.216 ton pada tahun 2015. Kondisi wilayah Kabupaten Tuban merupakan pendukung utama karena memiliki kondisi iklim, lahan dan sumber daya alam yang sangat mendukung pengembangan usaha jenis komoditas pertanian terutama pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan.

b. Potensi Perikanan

Kabupaten Tuban memiliki wilayah pantai yang membujur dari arah barat (kecamatan Bancar), ke arah timur (kecamatan Palang) sepanjang 65 km. Kondisi wilayah perairan yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat menguntungkan, Kabupaten Tuban memiliki produk tangkapan ikan laut, dengan jumlah produksi sekitar 49.408,46 Ton.

Hal tersebut menjadikan sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian sehingga akan terus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kedepan.

c. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Tuban terdiri dari potensi tambang galian mineral non logam dan batuan (Batu Gamping, Fosfat, Pasir, Gypsum, Lempung, dolomit pasir kwarsa, serta Bahan Galian lainnya seperti Batu Gunung, dan Tanah Urug).

d. Potensi Industri

Beberapa komoditas unggulan yang dihasilkan industri-industri kecil maupun menengah di Kabupaten Tuban pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar yaitu produk yang berkualitas dan memiliki karakteristik yang khas, sehingga memiliki

peluang yang cukup besar dan kompetitif untuk menarik minat konsumen baik di tingkat lokal, regional dan nasional.

Produk-produk industri yang berkembang di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Industri Makanan: Industri olahan ikan yaitu: krupuk ikan di Kecamatan Tambak boyo, Jatirogo, Jenu dan Semanding, Industri abon ikan cakalang di kecamatan Tuban. Industri kripik gayam di kecamatan Merakurak. Industri kecap CV. Kecap Laron di Kecamatan Tuban.
- Industri Hasil Hutan: Industri MEUBEL yang berada di Ds. Wotsogo Kecamatan Jatirogo dan di Kecamatan Tuban
- Industri lainnya : Industri Batik tulis dan Batik Gedhog Di Kecamatan Semanding, Kecamatan Kerek, Kecamatan Plumpang.

e. Potensi Pariwisata

Wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya memiliki cukup potensial akan obyek-obyek pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Diantaranya adalah:

- Pantai Boom terletak di Kecamatan Tuban sekaligus kawasan pantai berhutan bakau yang melestarikan ekosistem pantai.
- Makam sunan Bonang, Museum kem,bang Putih dan Klentheng Tri yang terletak di Kecamatan Tuban.
- Wisata petik klengkeng yang berada di Kecamatan Kerek yang merupakan sentra batik
- Wisata pantai kelapa dan goa Suci yang terletak di Kecamatan Palang, juga Wisata Goa Ngerong yang terletak di Kecamatan Rengel, yaitu goa yang didalamnya terdapat sungai yang di huni banyak ikan.

Pertumbuhan Ekonomi.

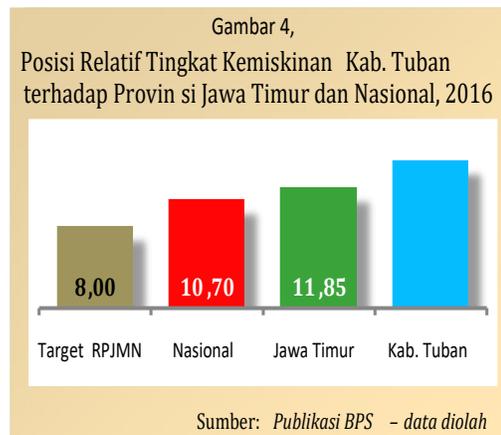
Struktur ekonomi Kabupaten Tuban dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban pada kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada tahun 2016 dipengaruhi oleh lima besar pembentuk PDRB yaitu:

1. Industri pengolahan 27,51%
2. Pertanian, Kehutanan dan perikanan 21,20 %
3. Konstruksi 13,27 %
4. Perdagangan dan Reparasi 13,09%
5. Pertambangan dan penggalian 9,10

KONDISI KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi adalah dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks



Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

keparahan kemiskinan. Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

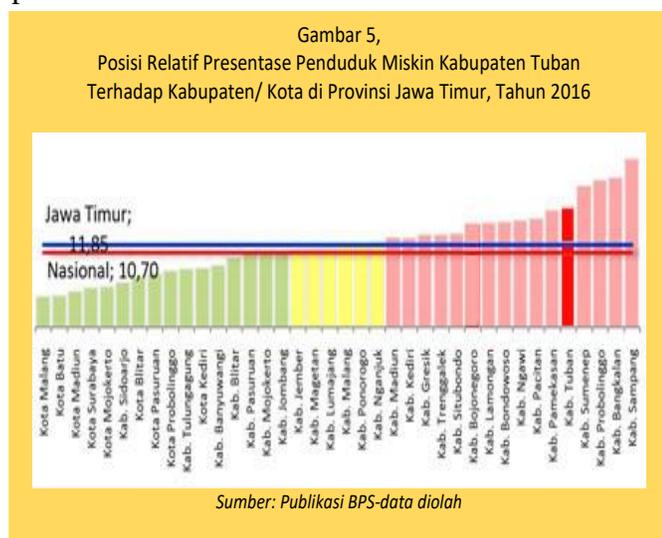
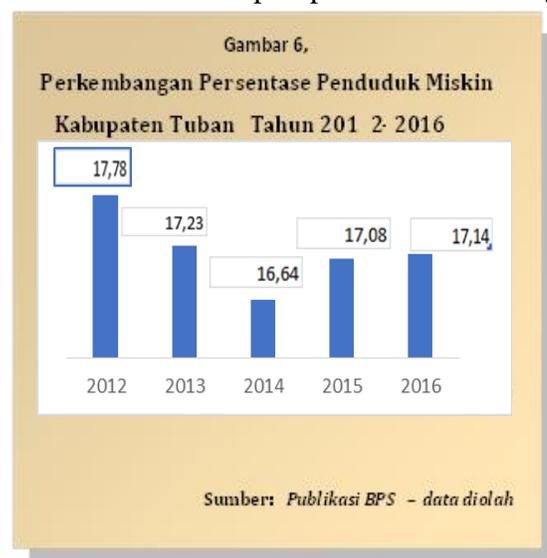
1) Persentase Penduduk Miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah sebesar 17,14 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, di mana pada tahun yang sama persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 11,85 persen sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 10,70 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban masih lebih besar jika dibandingkan dari capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban (pada tahun 2016) menempati urutan ke 34 (tiga puluh empat) dari yang terendah.

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend fluktuatif menaik, mengindikasikan bahwa diperlukan lagi kebijakan dan program yang lebih diupayakan oleh Pemerintah

Kabupaten Tuban dalam rangka menurunkan persentase penduduk miskin dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Selama periode



2012-2016, trend perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun memiliki trend yang relevan, akan tetapi percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban hanya sekitar 0,64 persen dari rata-rata percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan sekitar 53 persen dari rata-rata percepatan penurunan di tingkat Nasional.

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

diperlukannya lagi kebijakan dan tindak lanjut untuk terus mengusahakan menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Tuban yang lebih signifikan.

2) Jumlah Penduduk Miskin.

Dengan persentase kemiskinan sebesar 17,14 persen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah sebanyak 198.350 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar ±4.703,3 ribu jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar ±27.764,3 ribu jiwa. Dengan demikian Kabupaten tuban pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 4,22 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan sebesar

0,71 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten /Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sebagaimana gambar



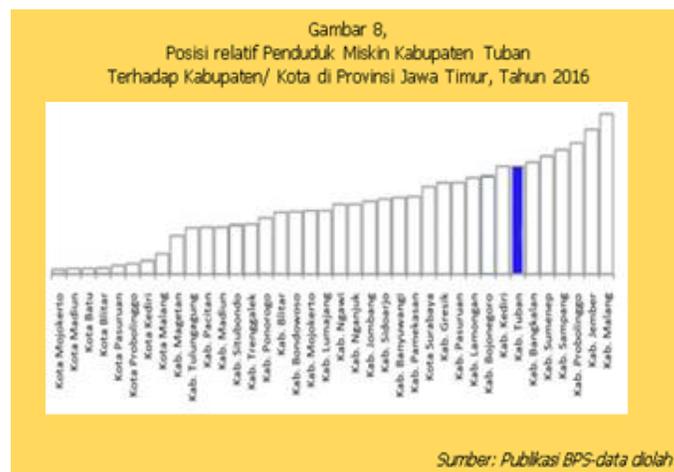
berikut.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

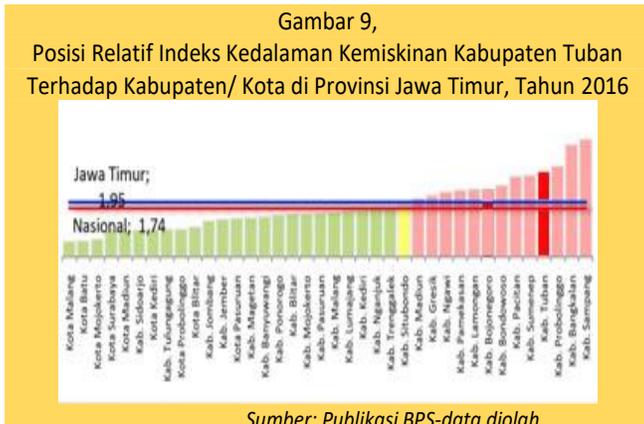
Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah sebesar 3,03 mengalami peningkatan sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,98 sedangkan Indeks secara Nasional sebesar 1,74, maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Tuban lebih tinggi (lebih buruk) karena berada di atas tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi Jawa Timr maupun Nasional.

Diantara

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 berada pada posisi ke 35 (tiga puluh lima).



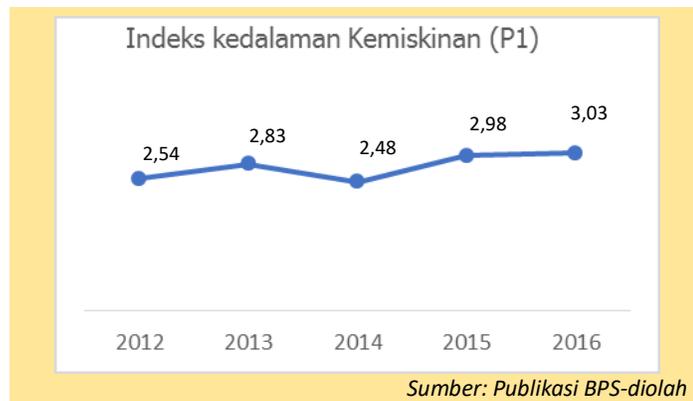
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)



Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2012-2016, yang menunjukkan trend fluktuatif naik seperti pada gambar 10, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin dari tahun ke tahun belum membaik. Diperlukan kebijakan maupun program yang harus diupayakan Pemerintah dalam rangka memperkecil kesenjangan

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif.

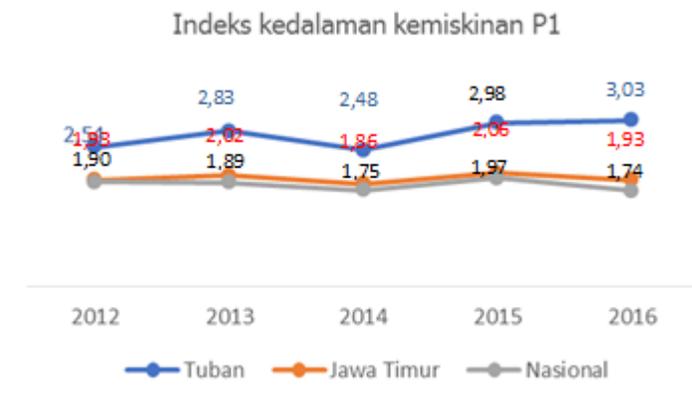
Gambar 10,
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Tuban, Tahun 2012-2016



Selama periode 2012-2016, trend perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan trend yang berbeda (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Gambar 11,
Relevansi Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan ketidakrelevansian antara perkembangan di Kabupaten Tuban dengan di capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi petunjuk bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah



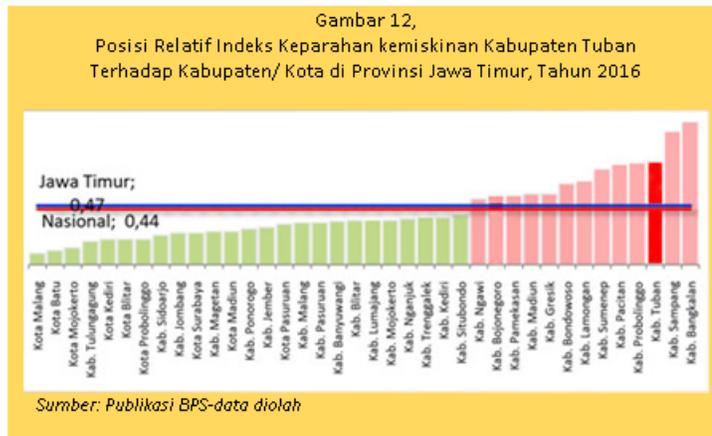
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

Kabupaten Tuban dalam memperkecil nilai indeks kedalaman kemiskinan melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah sebesar 0,82 mengalami peningkatan sebesar 0,03 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,47 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 0,44, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Tuban masih belum baik karena berada di atas tingkat kesenjangan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

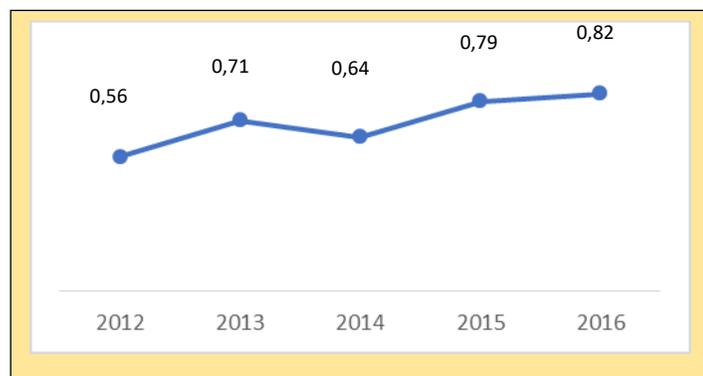
Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Tuban pada tahun 2016 berada pada posisi ke 29 (dua puluh sembilan) dari yang terendah.



Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tuban selama periode 2012-2016, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.

Gambar 13,
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2012-2016

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan trend menaik, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin belum membaik. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah



diupayakan Pemerintah dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin belum dapat berjalan efektif dan belum berdampak positif dalam mempersempit kesenjangan antar penduduk miskin.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

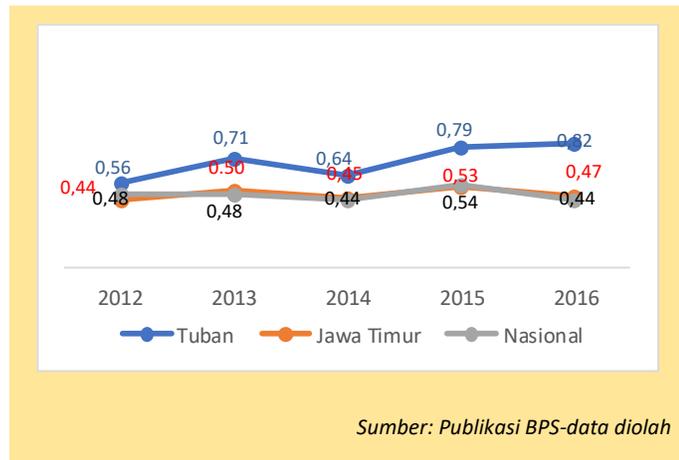
Selama periode 2012-2016, trend perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan trend yang tidak sama (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang tidak relevan antara perkembangan di Kabupaten Tuban dengan di Provinsi Jawa Timur dengan Nasional, seperti yang tampak pada gambar 14 berikut,

Gambar 14,

Relevansi Perkembangan Indeks Keparahhan Kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2012-2016

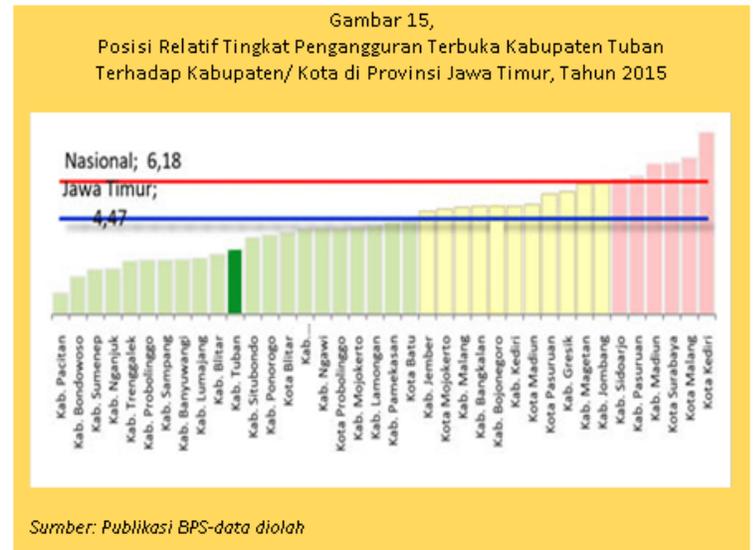
Ini menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam memperkecil nilai indeks keparahan kemiskinan melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.



5) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah sebesar 3,03 persen, mengalami penurunan sebesar 0,6 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Bila melihat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur dan secara Nasional, di mana pada tahun yang sama persentase TPT di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,21 persen sedangkan secara Nasional adalah sebesar 5,61 persen, maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban masih lebih baik karena berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten tuban pada tahun 2015 adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Perkembangan TPT di Kabupaten Tuban selama tahun 2012-2016, menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif, dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.



Gambar 16,

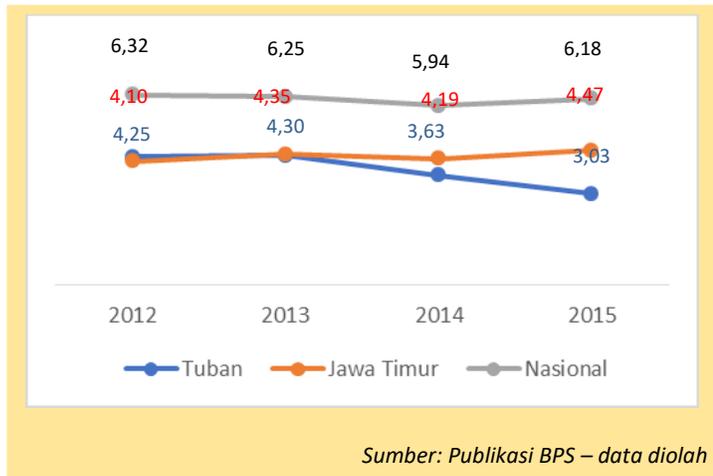
Perkembangan TPT Kabupaten Tuban, Tahun 2012 – 2016

Dengan banyaknya industry di Kabupaten Tuban, tentunya mengurangi tingkat pengangguran di Kbpupaten Tuban, dan hal ini tentu menjadi informasi bahwa kebijakan maupun program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban.



Gambar 17,

Relevansi Perkembangan TPT Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2012 – 2015



Selama periode 2012-2015, trend perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Tuban menunjukkan trend yang tidak sama (tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tetapi Kabupaten Tuban masih lebih baik dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari seluruh analisis indikator-indikator dalam dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, indikator yang masih menjadi masalah adalah pada indikator Persentase Penduduk Miskin karena secara perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi dan Nasional masih menunjukkan kondisi lebih buruk, Dan perkembangan capaian indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) menunjukkan trend yang menurun. Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) berdasarkan perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi dan Nasional menunjukkan kondisi capaian yang lebih baik, dan perkembangan capaian indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) dengan trend yang semakin membaik.

Dimensi Pendidikan

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi pendidikan di Kabupaten Tuban dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang pendidikan selama kurun waktu 2012-2016 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Perkembangan capaian indikator bidang pendidikan.

Dari 10 indikator pada dimensi pendidikan di Kabupaten Tuban selama periode tahun 2012-2016, seluruh indikator menunjukkan trend perkembangan membaik (trend meningkat). Gambaran perkembangan capaian indikator-indikator pada dimensi pendidikan di Kabupaten Tuban tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4,
Perkembangan Capaian Indikator – indikator Dimensi Pendidikan,
Tahun 2014 - 2016

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)			(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100,82	109,11	110,30	114,55	102,13
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	-	-	108,55	105,75	100,41
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	-	-	69,37	61,86	73,01
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	-	-	94,42	99,53	99,83
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	-	-	88,97	98,70	93,65
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA	-	-	46,86	68,49	69,66
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th	-	-	-	0	0
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th	-	-	-	0	0,06
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th	-	-	-	0,61	0,3
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+	83,61	82,23	99,02	96,90	99,89

Sumber:RPJMD - Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

2) Capaian indikator pendidikan terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator dimensi pendidikan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama (posisi relatif indikator) adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5,
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Pendidikan,
Kabupaten Tuban terhadap Provinsi & Nasional
Tahun 2016

Indikator	Capaian Tahun 2016		
	Kab. Tuban	Jawa Timur	Nasional
(1)	(6)	(5)	(6)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,13	108,17	109,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100,41	92,54	89,96
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	73,01	81,23	80,44
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,83	97,49	96,82
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	93,65	81,35	77,95
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	69,66	60,76	59,95
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th	0	0,68	0,76
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th	0,06	4,51	4,60
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th	0,3	5,12	4,98
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+	99,89	93,08	95,38

Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional

Dari tabel di atas, indikator-indikator dimensi pendidikan di Kabupaten Tuban untuk tahun 2016 yang masih bermasalah berdasarkan perspektif posisi relatif

terhadap Provinsi dan Nasional adalah: (i) angka partisipasi kasar SMA/MA; (ii) angka partisipasi murni SMA/ MA, ke dua indikator ini menunjukkan capaian lebih rendah dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sedangkan angka melek huruf penduduk usia 15+ menunjukkan capaian lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional.

3) Upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas bidang pendidikan.

Beberapa upaya program/kegiatan berikut wilayah sasaran yang telah dilakukan Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Tuban guna memperbaiki indikator-indikator dimensi pendidikan yang sudah dilakukan adalah:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non formal di setiap Kecamatan
- Program Pendidikan Luar Biasa
- Program Bantuan BOS
- Perbaikan gedung sekolah di setiap desa
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Menejemen Pelayanan Pendidikan

Dimensi Kesehatan

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi kesehatan di Kabupaten Tuban dilakukan dengan melihat perkembangan capaian-capaian indikator-indikator bidang kesehatan selama kurun waktu 2012 – 2016 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Perkembangan capaian indikator bidang kesehatan.

Dari 6 indikator pada dimensi kesehatan di Kabupaten Tuban selama tahun 2015-2016, indikator prevalensi balita kekurangan gizi, indikator proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih/ tenaga medis, dan rasio bidan per 100 ribu penduduk menunjukkan trend perkembangan membaik. Sementara itu indikator AKB per 1000 kh, AKBa per 1000 kh, dan indikator AKI per 100 ribu kh menunjukkan trend menurun. Gambaran perkembangan capaian indikator-indikator dimensi kesehatan di Kabupaten Tuban tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6,
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Kesehatan Tahun 2012-2016

Indikator	Capaian Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh.	155	171	186	225	219
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh.	24	12	10	12	11
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	0,38	0,40	0,45	0,42	0,37
Persalinan oleh Tenaga Medis (%)	97,81	98,09	99,02	96,90	99,46

Sumber: Dinas Kesehatan-profil kesehatan - data diolah Kabupaten Tuban

2) Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator dimensi kesehatan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 bil dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan

capaian Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana Nampak pada tabel berikut:

Tabel 7,

Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator dimensi Kesehatan, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2016

Indikator	Capaian Tahun 2016		
	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh.	219	25,82	32,00
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh.	11	91,00	302,00
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,02	3,40	3,40
Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis (%)	99,46	91,51	96,28

Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional

Dari tabel di atas, indikator yang masih sedikit bermasalah adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan angka capaian lebih tinggi terhadap capaian Provinsi dan capaian Nasional, dan menunjukkan angka yang tinggi sekali.

3) Upaya-upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas-nya:

- Program obat dan pembekalan kesehatan di 33 puskesmas
- Program upaya kesehatan masyarakat termasuk upaya penyelenggaraan JKN
- Program promosi kesehatan dan
- Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Pengembangan lingkungan sehat
- Standarisasi pelayanan kesehatan
- Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- Pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar.

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar di Kabupaten Tuban dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang prasarana dasar selama kurun waktu 2012-2016 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

1) Perkembangan capaian indikator bidang prasarana dasar.

Dari 2 (dua) indikator pada dimensi sarana prasarana/ infrastruktur dasar di Kabupaten Tuban selama periode tahun 2012-2016, semua indikator menunjukkan *trend* membaik.

Tabel 8,

Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Sarana/ Infrastruktur Dasar

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	68	70	73	73,3	74
Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak	49,33	57,78	63,66	74,27	77,54

Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional

2) Capaian indikator prasarana dasar terhadap Provinsi dan Nasional

Capaian indikator-indikator dimensi sarana prasarana/ infrastruktur dasar di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 bila di bandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 9,

Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana Dasar, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2016

Indikator	Capaian Tahun 2016 (%)		
	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	74	75,83	71,14
Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak	77,54	67,80	68,15

Sumber: Publikasi BPS

Berdasarkan tabel diatas, indikator pada dimensi sarana dan prasarana/ infrastruktur dasar di Kabupaten Tuban menunjukkan posisi relatif dengan capaian yang lebih baik rendah terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Rumah tangga dengan Akses Air Minum Layak tetapi lebih tinggi dari capaian secara Nasional.

3) Upaya – upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas- nya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam dimensi Prasarana/ Infrastruktur dasar selama tahun 2016 adalah:

- ❖ Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- ❖ Program pengembangan dan pengadaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- ❖ Program pengembangan infrastruktur pedesaan
- ❖ Program perbaikan perumahan
- ❖ Pendampingan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 10 lokasi setiap desa.

Dimensi Ketahanan Pangan

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Tuban dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator bidang ketahanan pangan selama kurun waktu 2015-2016 (2 tahun terakhir) dan capaian indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan

Dari indikator-indikator pada dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Tuban selama periode tahun 2015-2016, menunjukkan trend membaik. Sementara itu perkembangan proporsi penduduk dengan asupan kalori yang tuangkan dalam Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Skor PPH tahun 2015 87% sudah mengalami peningkatan bila di bandingkan skor PPH tahun 2011 yaitu 78%.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

Tabel 10,
Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Regulasi Ketahanan Pangan	50	75	70	75	79
Tingkat Kemandirian Pangan	70	75	80	85	90
Penguatan Cadangan Pangan	70	83	83	85	90
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	60	45	70	85	90
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60	65	70	80	90
Skor Pola Pangan Harapan	78	80	80	87	87
Pengawasan dan Pembinaan Pangan	50	63	73	78	89,5
Penanganan Daerah Rawan Pangan	20	31	44	55	60

Sumber: RPJMD Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat trend membaik disetiap indikator ketahanan pangan di Kabupaten Tuban. Hampir keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah tentang penataan ketersediaan pangan di Kabupaten Tuban dan sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan yang ada. Hal ini berimbas pada tingkat kemandirian pangan di Kabupaten Tuban yang pada tahun 2011 mencapai 70% meningkat menjadi 90% pada tahun 2015. Ini menunjukkan tingkat kemandirian pangan Kabupaten Tuban sudah cukup baik. Selain itu juga didukung dengan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Sehingga masyarakat juga bisa terus memantau perkembangan ketersediaan pangan yang ada. Dengan adanya pemantauan bersama terkait pasokan dan harga serta akses pangan, menyebabkan adanya stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Tuban, di mana presentase dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan pembinaan pangan secara terus menerus, juga sigap dalam penanganan daerah rawan pangan. dimana pada tahun 2011 penanganannya hanya mencapai 20%, naik menjadi 60% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin luas dan besar cakupan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Tuban.

Dari seluruh analisis indikator-indikator dalam dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, indikator yang masih menjadi masalah adalah pada indikator Persentase Penduduk Miskin karena secara perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi dan Nasional masih menunjukkan kondisi lebih buruk, Meskipun perkembangan capaian indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) menunjukkan trend yang semakin membaik. Sedangkan itu untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi dan Nasional menunjukkan kondisi capaian yang lebih baik, dan perkembangan capaian indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) dengan trend yang semakin membaik.

Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya penanggulangan kemiskinan, secara legalitas berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Tuban sebagaimana terperinci pada tabel berikut.

Tabel 11,
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Berkaitan dengan Penanganan
Kemiskinan di Kabupaten Tuban

No	Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	Peraturan Tentang	Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan
1.	Peraturan Daerah 24/ 2016	RJPMD	Rencana Pengentasan Kemiskinan
2.	Peraturan Daerah 04/2008	Organisasi Lembaga Teknis Daerah	Tentang Pembentukan Tim Teknis TKPK
3.	Peraturan Daerah 05/ 2003	Organisasi Kecamatan dan Kelurahan	Pembetulan tim TKPK
4.	Keputusan Bupati 188.45/ 142/ KPTS/ 414.031/2017	Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban

Tinjauan Kebijakan

Kebijakan berupa peraturan, program dan kegiatan telah diupayakan dilaksanakan di Kabupaten Tuban dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Beberapa program dan kegiatan ada yang merupakan program Pemerintah Pusat baik yang sumber pendanaannya oleh Pemerintah Pusat maupun sharing dengan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:

- Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan dimaksud dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan program Nasional baik yang pernah dan tengah berlangsung di Kabupaten Tuban menurut klaster program adalah sebagai berikut:

- (1) Program/kegiatan yang termasuk kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (klaster 1) adalah:
 - Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN);
 - Program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - JAMKESMAS-JAMKESDA; dan
- (2) Program/kegiatan yang termasuk kelompok program pemberdayaan masyarakat (klaster 2) adalah:
 - PNPM Mandiri Perkotaan; dan • PNPM Mandiri Pedesaan.
- (3) Program/kegiatan yang termasuk kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3) adalah:
 - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Program Kredit Usaha Bersama.

Tinjauan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan dan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang telah dilakukan ternyata masih memiliki berbagai kendala. Beberapa program sudah tepat sasaran dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan warga miskin. Namun di lain pihak, masih ada program yang dinilai belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga miskin, atau bahkan bisa dikatakan kontra produktif dan perlu dikaji ulang kembali nilai kemanfaatannya.

Pada bidang pendidikan, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi program yang paling sering muncul di bahan perbincangan masyarakat.

Hadirnya program BOS yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada kenyataannya malah menjadikan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat miskin semakin besar, atau istilah warga miskin "ada BOS, sekolah gratis, tapi biaya sekolah tambah besar". Hal ini dikarenakan karena biaya pendidikan tidak diringankan melainkan dipindahkan, dimana biaya sekolah digratiskan, namun ada biaya tambahan yang semakin besar untuk buku-buku pelajaran, iuran sekolah, seragam, dll. Selain itu, masih dibutuhkan sosialisasi mengenai program BOS kepada masyarakat terutama warga miskin yang masih belum paham mengenai keberadaan dan fungsi program BOS kepada mereka. Keberadaan komite sekolah di beberapa sekolah malah dijadikan sebagai legitimasi dari pihak sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Kurangnya transparansi dari pihak sekolah mengenai pengelolaan bantuan biaya BOS di tambah dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan warga miskin mengenai program BOS menambah daftar permasalahan yang terjadi pada program BOS tersebut.

Dalam hal pangan, program bantuan beras bersubsidi (raskin) juga menemui berbagai permasalahan. Permasalahan utama dari program raskin ini adalah mekanisme pembagian raskin yang belum merata kepada seluruh warga miskin, bahkan warga yang tidak termasuk miskin pun ikut mendapatkan jatah raskin tersebut. Keterbatasan dalam proses pendataan sasaran penerima manfaat mengakibatkan terjadinya pembengkakan subsidi negara untuk program ini karena subsidi raskin juga dinikmati oleh warga yang tidak masuk dalam kategori miskin.

Di lain pihak, warga miskin bersikap pasrah pada saat jatah raskin yang diberikan kepada mereka lebih sedikit daripada jatah seharusnya (karena porsi raskinnya dikurangi dan dibagi kepada warga yang tidak miskin). Program ini sangat dibutuhkan pendataan terbaru setiap tahun dari tingkat desa, supaya pembagian raskin tepat sesuai sasaran. Pelaksanaan program Jamkesmas sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin sudah berjalan lebih baik, dengan semakin meratanya warga miskin yang mendapatkan program ini (walaupun tetap masih ada warga miskin yang belum tersentuh program jamkesmas). Keterbatasan lain dari program jamkesmas adalah program jamkesmas hanya terbatas menjangkau penyembuhan penyakit yang ringan saja, sedangkan untuk penyakit berat, pasien harus membayar biaya sendiri. Selain itu, keterbatasan pengetahuan warga miskin terhadap program jamkesmas juga berdampak pada saat proses administrasi di Rumah Sakit, dimana warga miskin tidak begitu mengetahui mekanisme jamkesmas (menjadi pasien reguler), kemudian dengan tiba-tiba minta dipindah menggunakan jamkesmas, sementara data yang sudah masuk ke Rumah Sakit adalah data pasien reguler.

Bantuan stimulan perumahan swadaya (Rehabilitasi RTLH) pada dasarnya sangat diharapkan oleh masyarakat sangat miskin dengan kondisi rumahnya yang tidak layak huni. Program ini dipandang sangat tepat untuk mengentaskan kemiskinan karena langsung mengenai 4 (empat) dari 14 (empat belas) indikator kemiskinan yang diterbitkan BPS. Kendala dari program ini adalah ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, sehingga pemberian bantuannya pun terbatas.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:

- ❑ Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, ber-tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- ❑ Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- ❑ Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- ❑ Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kondisi Kemiskinan Multidimensi:

- persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 0,6 persen;
- tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 17,08 % menjadi 17,14 % di tahun 2016 (± 198.350 ribu jiwa);
- tahun 2016, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
- perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
- indikator-indikator yang perlu perhatian (menjadi fokus) untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Bidang	Indikator yang perlu mendapat Intervensi	Keterangan	
		Posisi Relatif terhadap capaian Provinsi & Nasional	Perkembangan Antar-waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	lebih rendah dari capaian Provinsi dan Nasional	Menunjukkan trend membaik dari tahun ke tahun
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	lebih rendah dari capaian Provinsi dan Nasional	Menunjukkan trend membaik dari tahun ke tahun
	Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15+	lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional	Fluktuatif, tahun terakhir lebih baik
Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 100ribu kh	lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional	Konsisten menurun
Prasarana Dasar	Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Minum Layak	lebih rendah dari capaian Provinsi dan Nasional	konsisten meningkat
	Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional	Konsisten meningkat

Indikator yang tidak disebutkan di atas, telah menunjukkan kondisi yang baik, baik terhadap posisi relatif maupun perkembangan antar waktunya.

2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan:

- telah memiliki regulasi yang secara spesifik mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut;
- program/kegiatan yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi:

	sudah	belum
perencanaan program/kegiatan diawali dengan analisis <i>fokus</i> masalah pada masing-masing indikator dimensi kemiskinan	✓	
perencanaan program/kegiatan memperhatikan analisis <i>De-terminan kemiskinan</i> masing-masing dimensi kemiskinan	✓	
penerima manfaat program/kegiatan berdasarkan basis data kemiskinan	✓	

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

terpadu (BDT)		
penetapan wilayah sasaran program/kegiatan ditentukan melalui analisis kuadran untuk menentukan prioritas wilayah		✓
antar program/kegiatan menunjukkan komplementaritas program/kegiatan	✓	

Rekomendasi.

Berikut terdapat beberapa rekomendasi yang dianjurkan kepada tiap –tiap stakeholder:

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
Pemerintah Kab. Tuban	<ol style="list-style-type: none"> mempertahankan upaya-upaya (kebijakan dan program) penanggulangan kemiskinan yang telah menunjukkan hasil capaian yang baik pada tahun ini; lebih memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah, dan aturan pelaksanaannya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya, misalnya: Perda tentang penanggulangan kemiskinan; peraturan yang mewajibkan Perangkat Daerah yang memiliki program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk memanfaatkan data PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 yang telah di <i>up date</i> oleh TKPK Kabupaten Tuban; dan lain sebagainya.
Sekretaris TKPK	<p>memperkuat Sekretariat TKPK dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan peralatan yang sesuai kualifikasi untuk pengelolaan data kemiskinan; melatih personil kesekretariatan agar memiliki kualifikasi dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang <i>up to date</i>.
Ketua Pokja Data & Informasi, TKPK	mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis data BDT-2015 dan data lainnya.
Ketua Pokja Kemitraan, TKPK	<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (<i>corporate social responsibility</i>), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media; menyusun <i>directory</i> lembaga mitra program yang telah siap bermitra dalam program penanggulangan kemiskinan.
Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPK	<ol style="list-style-type: none"> merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; menyiapkan personil pengelola pengaduan masyarakat; mengembangkan sistem pengaduan berbasis web.
Wakil Ketua TKPK	meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnuyati)

Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin,
Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2010, Panduan
Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk
Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.

-----, Outline, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan –
Tahun 2013, ---